



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
SEKRETARIAT
Pivinan Auliya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN
2025

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1	ZULFAN	Ketua KPU Kota Dumai	Ketua Pembina
2	ABDI SOFYANDI	Anggota KPU Kota Dumai	Pembina
3	FEARI AFRIDANI	Anggota KPU Kota Dumai	Pembina
4	SYAFRIZAL	Anggota KPU Kota Dumai	Pembina
5	YOLANDA OKTORA EFFENDI	Anggota KPU Kota Dumai	Pembina
6	BUDI SURYONO	Sekretaris KPU Kota Dumai	Pembina

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

ZULFAN

Kenai Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Givian Achlya.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN
2025

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1	FIVIAN AULIYA	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Redaksi
2	SYIFA ULIA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
3	WAN UTAMA WIJAYA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
4	ALYA OKTARI RAHMA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
5	ROZA OKTAVIANI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

ZULFAN

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

